



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5

Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat

Website : badilum.mahkamahagung.go.id PO BOX 1148 Jkt 13011 JAT

Nomor : 1119/DJU/PS.01/10/2019  
Lampiran :  
Hal : Pengendalian atas rekening penampungan  
Biaya perkara

Jakarta, 14 Oktober 2019

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Ketua Pengadilan Negeri  
di  
Seluruh Indonesia

Memperhatikan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 866/SEK/KU.02/6/2019 tanggal 18 Juni 2019 hal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini diminta kepada Bapak/Ibu untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 bahwa seluruh rekening milik satuan kerja lingkup kementerian negara / lembaga wajib terdaftar dalam Treasury National Pooling, oleh karenanya bagi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang rekening penampungan biaya perkara belum terdaftar dalam Treasury National Pooling agar segera mendaftar sesuai ketentuan dalam PMK tersebut.
2. Bagi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan negeri yang rekening biaya perkaranya belum terdaftar dalam Treasury National Pooling sehingga masih memunculkan jasa giro, pendapatan jasa giro tersebut agar segera dikeluarkan dan disetorkan ke kas negara.

Demikian disampaikan agar segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,  
  
Dr. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Bapak Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Jakarta, 18 Juni 2019

Nomor : 866/SEK/KU.02/6/2019  
Lampiran : -  
Sifat : Segera  
Hal : Perintah

Yth.

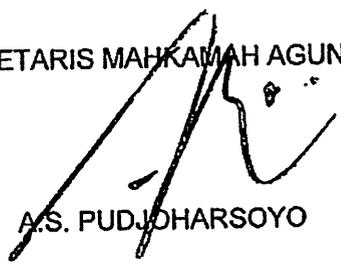
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
  2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
  3. Direktur Jenderal Badan Peradilan TUN dan Militer
- Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI  
Jl. Jend. A. Yani Kav.58, Bypass Cempakah Putih  
Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta.

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 103C/LHP/XVI/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tahun 2018 tentang Rekening Penitipan Lainnya belum disertakan dalam Program *Treasury National Pooling* dan Pendapatan Jasa Giro belum disetor sebesar Rp194.611.132,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus sebelas ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperintahkan kepada Saudara untuk menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur pengendalian atas rekening penampungan biaya perkara yang dikelola Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Untuk perhatian dan pelaksanaannya.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

  
A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.